

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam. Adalah Semua Ibu hamil wajib melakukan skrining saat usia kehamilan 34- 36 minggu. Puskesmas membuat persyaratan untuk melakukan persalinan di Puskesmas Magek yaitu, harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, Jaminan Kesehatan buku Kesehatan Ibu anak dan wajib melampirkan surat telah melakukan skrining. Puskesmas membuat surat pernyataan yang wajib diisi oleh semua ibu hamil, jika surat tidak diisi dan di tandatangi ibu tidak bisa mendapatkan pelayanan di persalinan di Puskesmas Magek
2. Kendala – kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam adalah Ibu keberatan untuk melakukan skrining karena tidak mearsa ada gejala seperti demam, batuk,flu yang mengarah kepada COVID-19. Ibu merencanakan persalinan di Bidan Praktek Swasta karena

ada beberapa BPS di Wilayah Kerja Puskesmas Magek tidak mewajibkan untuk melakukan skrining. Takut pelayanan terhadap mereka dipersulit jika mereka positif COVID-19. Masyarakat masih banyak menerima informasi – informasi negatif tentang skrining sehingga mereka tidak bersedia untuk diskruining.

3. Upaya Penanggulangan Kendala Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam adalah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan lintas sector seperti tokoh masyarakat, pemerintahan nagari dan ibu –ibu PKK, sehingga mereka tidak ragu lagi melakukan Skrining Melakukan promosi kesehatan baik menggunakan media cetak maupun media elektronik

B. Saran

1. Adanya kesatuan antara Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta untuk mewajibkan semua ibu hamil yang akan bersalin diwajibkan skrining.
2. Dinas kesehatan perlunya melakukan pengawasan kepada Bidan Praktek Swasta untuk mewajibkan ibu hamil yang akan bersalin melakukan skrining.
3. Sosialisasi terkait peraturan Gubernur tentang skrining Ibu Hamil tidak hanya dilaksanakan oleh pihak puskesmas saja tetapi juga harus dilaksanakan Bidan Praktek Swasta. Sehingga dapat mengendalikan COVID-19

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Amiruddin, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*, edisi 1, Kencana, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung
- Heryani, Reni, 2011, *Buku Ajar Konsep Kebidanan*. Jakarta
- Herkutanto dan Soerjono Soekanto, 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung
- Hutahaean, S, 2013, *Perawatan Antenatal*, Salemba Medika, Jakarta
- Herkutanto dan Soerjono Soekanto, 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung
- Iketut Swarjana, 2015, *Metode Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta
- Laica Marzuki, 1995, *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*, Hasanuddin University Pres, Makasar
- Kemenkes 2021. *Profil Kesehatan Indonesia 2020*: Jakarta
- Kemenkes RI. 2020. *Pedoman Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Dan Bayi Baru Lahir Di Era Pandemi Covid-19*. Jakarta
- Manggarai, 2021. *Efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat oleh puskesmas di kabupaten manggarai*, Jakarta
- Maisyarah, 2022. *Pusat Kesehatan Masyarakat*, Yayasan Kita Menulis, Yogyakarta

- Muhammad Alamsyah,dkk, 2020, *Rekomendasi penanganan virus corona (COVID-19) pada Maternal (Hamil bersalin dan nifas)*, Surabaya POGI Surabaya
- Puskesmas Magek, 2021. *Laporan Bulanan Puskesmas Magek Tahun 2021*. Kamang Magek
- Putri, 2017. *Dasar-dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Modul Pembekalan Manajemen dan Program Puskesmas*,Jakarta.
- Sardijoko S et al (2018) *Penguatan pelayanan Dasar di Pusksesmas*, Direktorat kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputian pembangunan Manusia, masyarakat dan keluarga, Kementrian PPN/Bapenas, ISBN: 978-602-90133-1-7, Jakarta.
- Sianturi E, (2021) *Sistem Infomasi Kesehatan*, Yayasan Kita Menulis, ISBN: 978,623,342,202-4, Jakarta
- Suprianto Abdi, 2009, *Potret Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Ototnomi Daerah, Analisis Studi Di Tiga Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang – Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok
- Salim dkk, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi danTesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke delapan, PT CitraAditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1998, *Pendekatan Sosiologi Hukum*, Bina Aksara, Jakarta
- Sulistiyawatiari, 2012, *Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan*, Salemba Medika Jakarta
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prawirahardjo, 2014. *Ilmu Kebidanan*, PT Bina Pustaka, Jakarta
- Romauli Suryati, 2011,*Buku ajar Asuhan Kebidanan 1*, Nuha Medika, Yogyakarta

Yesmil Anwar & Adang, 2017, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta

B. Peraturan Perundang Undangan.

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, 2020, *Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi COVID-19 Nomor: B-4 (05 April 2020)*, Jakarta

Gubernur Sumatera Barat, 2020. *Skrining Ibu Hamil Sebelum persalinaan dimasa adaptasi kebiasaan baru*. Padang

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

C. Sumber Lain

Bambang Santoso, 2007, *Relevansi Pemikiran Teori Robert B. seidman tentang “The Law Of Non Transferability Of The Law” Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Yustisia Nomor 70 Januari – April 2007, Semarang

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/diakses> pada tanggal 29 September 2021, pukul 21.21 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 oktober 2021, Pukul 13.00 WIB

Rochany,dkk, 2021, *Edukasi Dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Pada Ibu Hamil Di Masa Pandemi COVID 19*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Irsyad Vol. 3, No. 1 April 2021, Cilacap

Sanah Nor, 2017, *Pelaksanaan Fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal masalah hukum, jurnal masalah hukum, edisi 10, Bandung

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Simpus, 2020. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Di Kota Manado (Studi Puskesmas Bahu)*. Jurnal Eksekutif, Manado

World Health Organization (WHO). 2020. *Coronavirus Disease (COVID-19)*. <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>.